

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN KEMAMPUAN PT. DIRGANTARA INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KESIAPAN ALUTSISTA TNI ANGKATAN UDARA

Angki Rizki Pandu¹, Achmad Faisol²
Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut^{1,2}
angkirizki07@gmail.com¹, achmadfaisol22@gmail.com²

Abstract

In order to maintain the sovereignty and stability of the State of Indonesia, Indonesia must build a reliable national defense force. One of the requirements in building a national defense force that must be met by the Indonesian Armed Force is the availability of defense equipment that is in accordance with the operational needs of the Indonesian Armed Force. Indonesian Air Force as the guardian of sovereignty in the air, the defense equipment must always be updated and maintained properly. With the limited defense budget allocated by the government to the Indonesian Air Force, Indonesian Air Force is trying to meet the needs of defense equipment by empowering the domestic defense industry, in this case Indonesian Aerospace Industry as the only aerospace industry in the country. The problem that exists today is Indonesian Aerospace Industry has not been optimally empowered in increasing the readiness of the Indonesian Air Force defense equipment. With the increasing need and readiness of defense equipment as well as to avoid the dependence of the Indonesian Air Force on foreign defense equipment products in an effort to meet and maintain defense equipment readiness, it is necessary to have cooperation between the Indonesian Air Force and Indonesian Aerospace Industry. Empowerment of Indonesian Aerospace Industry can be achieved if there is a real effort in realizing the resolution of existing problems by reviewing the institutional and management levels of cooperation, integrating technological research capabilities between the Indonesian Air Force and Indonesian Aerospace Industry, and synergize existing resources. If these efforts can be realized then the empowerment of Indonesian Aerospace Industry in increasing the readiness of the Indonesian Air Force defense equipment can be realized so that the stability of the Indonesian State can be maintained.

Keywords: optimization, capability, readiness of defense equipment

Abstrak

Dalam rangka menjaga kedaulatan dan stabilitas Negara Indonesia, Indonesia harus membangun kekuatan pertahanan negara yang handal. Salah satu persyaratan dalam membangun kekuatan pertahanan negara yang harus dipenuhi oleh TNI adalah tersedianya Alutsista yang sesuai dengan kebutuhan operasional TNI. TNI AU sebagai penjaga kedaulatan di udara maka Alutsistanya harus senantiasa diperbarui dan dipelihara dengan baik. Dengan keterbatasan anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah kepada TNI AU, TNI AU berusaha untuk memenuhi kebutuhan Alutsista dengan pemberdayaan Industri Pertahanan dalam negeri, dalam hal ini adalah PT. Dirgantara Indonesia sebagai industri dirgantara satu-satunya di tanah air. Putra, Kustana (2014). Persoalan yang ada saat ini PT. Dirgantara Indonesia belum diberdayakan secara optimal dalam meningkatkan kesiapan Alutsista TNI AU. Dengan meningkatnya kebutuhan dan kesiapan Alutsista serta untuk menghindari ketergantungan TNI AU terhadap Alutsista produk luar negeri dalam usaha memenuhi dan mempertahankan kesiapan Alutsista, maka perlu adanya kerjasama antara TNI AU dengan PT. Dirgantara Indonesia. Pemberdayaan PT. Dirgantara Indonesia dapat tercapai apabila ada upaya nyata dalam mewujudkan penyelesaian persoalan yang ada dengan melakukan kaji ulang tataran kelembagaan dan manajemen kejasama, mengintegrasikan kemampuan riset teknologi antara TNI AU dengan PT. Dirgantara Indonesia serta mensinergikan sumber daya yang ada. Apabila upaya-upaya tersebut dapat diwujudkan maka pemberdayaan PT. Dirgantara Indonesia dalam meningkatkan kesiapan Alutsista TNI AU dapat terwujud sehingga stabilitas Negara Indonesia dapat terjaga.

Kata Kunci : optimalisasi, kemampuan, kesiapan alutsista

PENDAHULUAN

Dalam rangka melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI perlu membangun kekuatan pertahanan negara yang handal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 10 Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun kekuatan pertahanan negara, yang harus dipenuhi oleh TNI adalah tersedianya Alutsista yang sesuai dengan kebutuhan operasional TNI khususnya TNI AU. Sampai dengan saat ini Alutsista yang digunakan TNI AU dalam memenuhi pelaksanaan tugas sangat mahal sehingga dalam hal pengadaan mendapatkan kualitas dan kuantitas yang sedikit. Dengan keterbatasan anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah kepada TNI, TNI berusaha untuk memenuhi kebutuhan Alutsista dengan pemberdayaan Industri Pertahanan dalam negeri, dalam hal ini adalah PT. Dirgantara Indonesia menjadi industri yang sangat strategis. TNI sebagai komponen bangsa yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas NKRI dalam pelaksanaan tugasnya sangat tergantung pada kesiapan Alutsista. Namun bila dihadapkan pada potensi ancaman yang mungkin dapat timbul dimasa depan secara kualitas dan kuantitas kesiapannya masih belum memadai. Persoalan yang ada saat ini PT. Dirgantara Indonesia belum diberdayakan secara optimal dalam meningkatkan kesiapan Alutsista TNI AU. Saat ini sarana riset yang dimiliki PT. Dirgantara Indonesia sudah bagus, namun demikian riset teknologi dirgantara yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dan TNI Angkatan Udara ini belum terintegrasi dengan baik, masih berjalan sesuai kepentingan masing-masing sehingga dalam pemanfaatan aset nasional dalam rangka membangun pertahanan negara Indonesia belum dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Undang-undang tentang pemberdayaan industri strategis sebenarnya sudah ada hanya saja sampai dengan saat ini undang-undang dan aturan tersebut belum dijabarkan sampai ke tingkat operasional serta belum tersosialisasi dengan baik. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Keberadaan nota kesepahaman ini sering diabaikan, padahal antara nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama adalah hal yang berbeda. Pemberdayaan kemampuan PT. Dirgantara Indonesia dapat tercapai apabila ada upaya nyata dalam mewujudkan penyelesaian persoalan yang ada dengan melakukan sinergitas riset teknologi antara PT. Dirgantara Indonesia dengan TNI AU,

mendukung dan meningkatkan kepercayaan kepada PT. Dirgantara Indonesia, mempertegas sinergitas dan kerjasama antara TNI AU dengan PT. Dirgantara Indonesia dalam bentuk MoU. Apabila upaya-upaya tersebut dapat diwujudkan maka pemberdayaan PT. Dirgantara Indonesia dalam meningkatkan kesiapan Alutsista TNI AU dapat terwujud sehingga stabilitas NKRI dapat terjaga.

TINJAUAN PUSTAKA

George R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* dikutip oleh Mangkunegara (2015) mengatakan, bahwa ada 6 sumber daya pokok dalam manajemen yang sangat penting untuk dikelola yaitu: Men, Materials, Machines, Methods, Money, Markets.

Menurut Alex Miller (2003), Manajemen strategi adalah suatu

kegiatan dalam sebuah organisasi yang melibatkan tiga unsur aktivitas manajemen yaitu melakukan analisa pada strategi yang akan ditetapkan, melakukan perumusan strategi yang akan digunakan serta melakukan implementasi dari strategi yang terpilih. Perumusan strategi dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang ada pada internal organisasi (IFAS) yaitu dengan melihat faktor kekuatan dan kelemahan pada organisasi. Serta melihat faktor eksternal (EFAS) yang mempengaruhi strategi dengan melihat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi serta ancaman yang dapat mengganggu organisasi dalam penerapan strateginya. Serta merumuskan strategi dengan teknik Strategic Factor Analysis Summary (SFAS).

Sarana adalah fasilitas yang diberikan oleh suatu organisasi yang dapat dipakai untuk kepentingan organisasi dalam mencapai maksud atau tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Sedangkan prasarana adalah bagian yang ada didalam sarana yang merupakan penunjang dalam kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Priansa (2015;72).

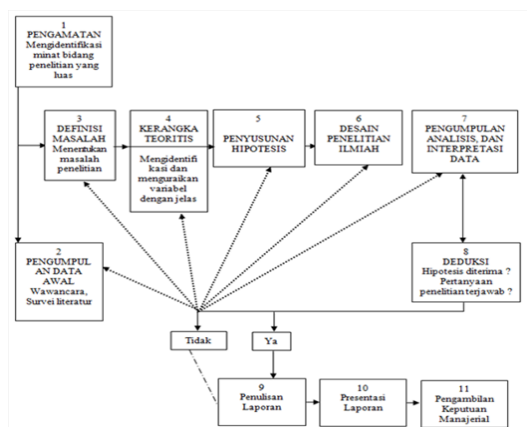
Menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson (2014, h. 164) kerjasama adalah suatu bentuk kegiatan berkelompok baik individual atau antar organisasi yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai tujuan yang sama demi memenuhi suatu kepentingan yang sama antara individu atau antar dua organisasi.

Purnomo Yusgiantoro (2014) Industri pertahanan yang kuat adalah suatu keinginan bersama, yang menyangkut dengan kebijakan industri pertahanan yang mampu memenuhi

kebutuhan alutsista. Strategi yang dipilih dalam membangun industri pertahanan adalah dengan meningkatkan kemampuan pelaku industri pertahanan sehingga mampu memproduksi Alutsista yang berkualitas, memenuhi kebutuhan pengguna dengan biaya yang murah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan naskah ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran tentang permasalahan dan perumusan solusinya dalam mengoptimalkan pemberdayaan PT. Dirgantara Indonesia terhadap kesiapan Alutsista TNI AU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memaparkan beragam faktor-faktor yang ditemukan selama penelitian dengan memberikan analisa pada setiap faktor tersebut dengan tujuan mendapatkan jawaban ilmiah dari apa yang diteliti tersebut. Adapun beberapa pendapat yang mengemukakan tentang metode penelitian deskriptif kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai model penelitian yang menggambarkan kondisi-kondisi yang terjadi berdasarkan temuan pada obyek yang diteliti yang kemudian disajikan dalam bentuk analisa-analisa dengan berbagai sudut pandang untuk memperoleh jawaban penelitian



Gambar 2.1 Desain Penelitian

Menurut Setyo Riyanto (2018), Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara eksternal dan internal untuk merumuskan strategi dalam sebuah organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 External Analysis Strategic (EFAS)

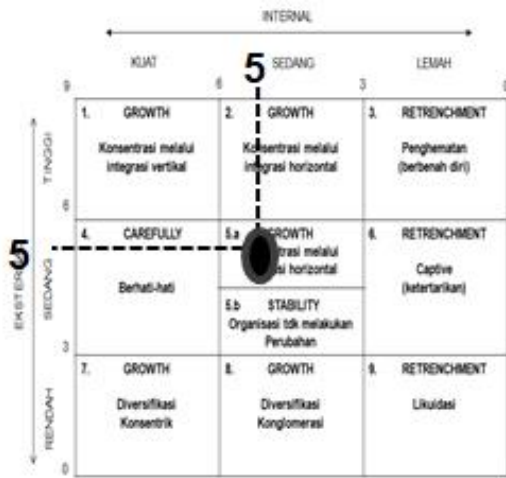
| NO | KEY FACTORS EKSTERNAL | WEIGHT | RATING | WEIGHTED SCORE |
|--------------------|---|--------------|--------|----------------|
| OPPORTUNITY | | | | |
| 1 | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA, PASAL 10 | 0,120 | 8 | 0,960 |
| 2 | DUKUNGAN PEMERINTAH TERKAIT KERJASAMA ANTAR LEMBAGA NEGARA | 0,108 | 7 | 0,756 |
| 3 | PERUBAHAN MINDSET DI LEMBAGA NEGARA | 0,087 | 6 | 0,522 |
| 4 | PERKEMBANGAN IT YANG RELATIF CEPAT | 0,096 | 7 | 0,672 |
| 5 | DUKUNGAN CRIMINAL SYSTEM JUSTICE | 0,090 | 6 | 0,540 |
| | | 0,500 | | 3,450 |
| THREATS | | | | |
| 1 | INFRASTRUKTUR YANG TERSEDIA TERBATAS | 0,119 | 5 | 0,595 |
| 2 | KESADARAN LEMBAGA TERKAIT KERJASAMA SEKTORAL MASIH BELUM OPTIMAL | 0,071 | 3 | 0,388 |
| 3 | ADANYA KONDISI PANDEMI COVID 19 | 0,097 | 4 | 0,388 |
| 4 | KEMAMPUAN PENGGUNAAN IT BELUM SEPENUHNYA MAKSIMAL | 0,104 | 4 | 0,416 |
| 5 | ADANYA EGO SEKTORAL | 0,109 | 4 | 0,436 |
| | | 0,500 | | 2,223 |
| | TOTAL | 1,000 | | 5,673 |

Tabel 2 Internal Factors Analysis Summary (IFAS)

| NO | KEY INTERNAL FACTORS | WEIGHT | RATING | WEIGHTED SCORE |
|-----------------|--|--------------|--------|----------------|
| STRENGTH | | | | |
| 1 | KEMAMPUAN PERSONAL MEMADAI | 0,122 | 8 | 0,976 |
| 2 | KOMITMEN PIMPINAN MEWUJUDKAN KERJASAMA YANG BERSINERGI | 0,113 | 7 | 0,791 |
| 3 | PENGETAHUAN PERSONEL TERKAIT ALUTSISTA KUAT | 0,092 | 6 | 0,552 |
| 4 | DUKUNGAN INTERNAL DARI LEMBAGA TNI TINGGI | 0,089 | 6 | 0,534 |
| 5 | SEMANGAT PERSONEL TINGGI | 0,084 | 6 | 0,504 |
| | | 0,500 | | 3,357 |
| WEAKNESS | | | | |
| 1 | ARAH PEMBERDAYAAN MASIH BELUM SEPENUHNYA TERARAH | 0,109 | 5 | 0,545 |
| 2 | POLA KERJASAMA MASIH MENGGUNAKAN CARA-CARA LAMA | 0,118 | 4 | 0,472 |
| 3 | KETERBATASAN SUMBER DAYA | 0,068 | 3 | 0,204 |
| 4 | PENGUMPULAN DATA TERKAIT ALUTSISTA BELUM MAKSIMAL | 0,119 | 5 | 0,595 |
| 5 | ANGGARAN BELUM MEMADAI | 0,087 | 4 | 0,348 |
| | | 0,500 | | 2,164 |
| | TOTAL | 1,000 | | 5,521 |

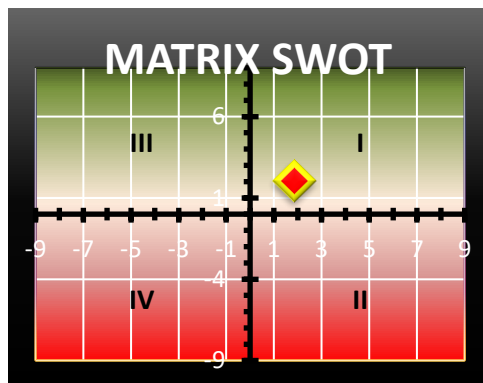
POSISI ORGANISASI

Berdasarkan uraian tabel tersebut maka dapat diketahui skor nilai EFAS 5,673 dan IFAS 5,521 sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui posisi organisasi sebagai berikut:



MATRIX SWOT

Adapun untuk posisi kuadran yang ada dalam matrix SWOT yaitu sebagai berikut :



Gambar 6.1 MATRIX SWOT

Berdasarkan gambar 6.1 di atas, dalam mengoptimalkan pemberdayaan PT Dirgantara Indonesia guna meningkatkan kesiapan alutsista TNI berada pada posisi kuadran I (agresif) yaitu mengacu pada hasil penghitungan faktor eksternal (3,450 - 2,223= 1,227) dan faktor internal (3,357-2,164 = 1,193). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penentuan langkah pemecahan yang tepat dalam mengoptimalkan pemberdayaan PT Dirgantara Indonesia guna meningkatkan kesiapan alutsista TNI adalah strategi yang bersifat agresif yaitu memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi berbagai kelemahan dan ancaman.

Tabel 3 Matrix SFAS

| NO | FAKTOR STRATEGI KUNCI | BOBOT | RANK | SCORE | JPD | | |
|----|--|-------|------|-------|-----|-----|-----|
| | | | | | JSD | JPI | JPI |
| 1 | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENETARA NASIONAL INDONESIA, PASAL 10 | 0,120 | 8 | 0,960 | | | |
| 2 | DUKUNGAN PEMERINTAH TERKAIT KERJASAMA ANTAR LEMBAGA NEGARA | 0,063 | 7 | 0,441 | | | |
| 3 | INFRASTRUKTUR YANG TERSEDIA TERHAJAS | 0,168 | 5 | 0,840 | | | |
| 4 | KEMAMPUAN PENGGUNAAN IT BELUM SEPENUHNYA MAKSIMAL | 0,084 | 4 | 0,336 | | | |
| 5 | ADANYA EGO SEK FORAL | 0,079 | 4 | 0,316 | | | |
| 6 | KEMAMPUAN PERSONAL MEMADAI | 0,089 | 8 | 0,712 | | | |
| 7 | KOMITMEN PIMPINAN MEWUJUDKAN KERJASAMA YANG BERSINERGI | 0,102 | 7 | 0,714 | | | |
| 8 | ARAH PEMBERDAYAAN MASIH BELUM SEPENUHNYA TERKARAH | 0,083 | 5 | 0,415 | | | |
| 9 | POLA KERJASAMA MASIH MENGGUNAKAN CARA-CARA LAMA | 0,084 | 4 | 0,336 | | | |
| 10 | PENGUMPULAN DATA TERKAIT ALUTSISTA BELUM MAKSIMAL | 0,129 | 5 | 0,645 | | | |
| | | 1,000 | | 3,700 | | | |

Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukan pada tahap pembahasan dan hasil penelitian maka strategi dalam melaksanakan pemberdayaan PT. Dirgantara Indonesia sehingga dapat tercapai kondisi yang diharapkan dari PT. Dirgantara Indonesia itu sendiri. Guna mengoptimalkan pemberdayaan kemampuan PT. Dirgantara Indonesia dibutuhkan langkah-langkah dalam meningkatkan kesiapan Alutsista TNI AU.

a. Kebijakan.

Dengan mempertimbangkan adanya aspek-aspek yang menjadi penentu terlaksananya optimalisasi pemberdayaan PT. Dirgantara Indonesia maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut “Terwujudnya pemberdayaan kemampuan PT. Dirgantara Indonesia melalui penyinerjian kegiatan riset teknologi yang dilakukan antara PT. Dirgantara Indonesia dengan TNI AU (melalui Dislitbangau), penyediaan dan perumusan piranti lunak kerjasama (nota kesepahaman) yang memberikan kepastian dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI AU yang dapat diproduksi PT. Dirgantara Indonesia, dan pemberian kepercayaan dan keyakinan TNI AU kepada PT. Dirgantara Indonesia guna meningkatkan kesiapan Alutsista TNI AU dalam rangka menjaga stabilitas NKRI”. Dengan kata lain kebijakan yang dapat diambil adalah “Terwujudnya pemberdayaan kemampuan PT. Dirgantara Indonesia melalui solusi dari pokok-pokok persoalan guna meningkatkan kesiapan Alutsista TNI AU dalam rangka menjaga stabilitas NKRI”.

b. Strategi.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu strategi sebagai implementasi kebijakan yang ada. Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Strategi pertama melaksanakan sinergitas riset teknologi antara PT. Dirgantara Indonesia dengan TNI AU (melalui Dislitbangau) dengan pemerintah dalam hal ini Kemhan, TNI AU, Kemenkeu dengan merencanakan dan menyiapkan anggaran, menyiapkan fasilitas Litbang, mendata suku cadang/komponen yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan riset, dan kemudian PT. Dirgantara Indonesia melakukan produksi massal sesuai permintaan dan kebutuhan TNI AU tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan strategi pertama adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah melalui Kemhan merencanakan dan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan riset yang akan dilakukan TNI AU.
 - b) Mabesau (Srenaaau) merencanakan dan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan riset yang akan dilakukan Dislitbangau.
 - c) Koharmatau berkoordinasi dengan Disaero terkait suku cadang / komponen yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan Alutsista TNI AU. Koharmatau berkoordinasi dengan Dislitbangau terkait sukucadang/komponen yang perlu untuk diteliti/ dikaji/ di riset khususnya dalam pembuatan prototype.
 - d) Dislitbangau dengan 6 fasilitas laboratoriumnya menganalisis dan mengevaluasi Alutsista yang cocok dan dibutuhkan. Dislitbangau membuat prototype dan menerbitkan sertifikat prototype materiil produk local.
 - e) PT. Dirgantara Indonesia melakukan produksi secara massal sesuai prototype yang cocok dan dibutuhkan Dislitbangau sesuai rencana bersama sebelumnya atau yang telah diprogramkan.
2. Strategi kedua. Meningkatkan dan memantapkan keyakinan dan kepercayaan terhadap PT. Dirgantara Indonesia sebagai industri pertahanan melalui kerjasama

dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI AU dimana PT. Dirgantara Indonesia memberikan kontribusi ekonomis kepada TNI AU serta memberikan gambaran penerapan pengelolaan perusahaan yang transparan dan terbuka serta membuktikan bahwa PT. Dirgantara Indonesia mampu memberikan hasil produksi terbaiknya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan strategi kedua adalah sebagai berikut:

- a) Mabesau membentuk tim khusus/mandiri bersama PT. Dirgantara Indonesia, dalam pengawasan, pengecekan terhadap pemberdayaan kemampuan PT. Dirgantara Indonesia dalam sektor sumber daya, fasilitas produknya, pengelolaan dokumen/softawre yang kemudian dianalisa, diolah untuk menjadi bahan masukan kepemimpinan dengan TNI AU sebagai supervisinya.
 - b) Mabesau menawarkan spektek yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh TNI AU kepada PT. Dirgantara Indonesia sebagai skala prioritas terlebih dahulu, sebagai bukti kepercayaan TNI AU kepada PT. Dirgantara Indonesia.
 - c) PT. Dirgantara Indonesia melakukan sosialisasi tentang kemampuannya secara profesional, jujur, transparan dan terbuka serta memenuhi batas waktu/deadline sesuai perjanjian dalam kontrak dengan kualitas hasil produk yang terbaik sesuai pesanan dan sebagai wujud bahwa PT. Dirgantara Indonesia merupakan industri dirgantara yang akuntable dan layak diperhitungkan di kancah perindustrian dirgantara dunia.
3. Strategi ketiga. Mempertegas jalinan kerjasama timbal balik kepentingan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan mewujudkan dikeluarkannya nota kesepahaman/ MoU antara Kemhan, TNI AU dengan PT. Dirgantara Indonesia agar PT. Dirgantara Indonesia dapat mendukung kesiapan Alutsista TNI AU. TNI AU melalui dinas penelitian dan pengembangannya melibatkan PT. Dirgantara Indonesia dalam hal riset/penelitian dalam rangka meningkatkan kesiapan Alutsista TNI

AU dan TNI AU melalui Disaero, Sops dan Koharmatau yang saling berkoordinasi melaksanakan kerjasama dalam hal pemeliharaan dan pengadaan barang (misal: suku cadang) kebutuhan Alutsista tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan strategi ketiga adalah sebagai berikut:

- a) Mabesau bersama Kemhan dan Mabes TNI membuat MoU dan perjanjian kerjasama yang bisa digunakan sebagai payung hukum bagi PT. Dirgantara Indonesia sebagai industri pertahanan untuk memproduksi kebutuhan Alutsista TNI AU.
- b) TNI AU melalui Koharmatau melibatkan PT. Dirgantara Indonesia dalam pemeliharaan dan pengadaan Alutsista sehingga ketika Alutsista tersebut dibutuhkan akan lebih mudah dalam penyediaan suku cadang/komponen maupun pemeliharaannya, terutama suku cadang yang sudah dibuat prototype.
- c) TNI AU melalui Dislitbangau sebagai satuan pelaksana melibatkan PT. Dirgantara Indonesia dalam penelitian /riset suku cadang /kebutuhan TNI AU terutama yang biasanya diambil/dipesan dari luar negeri dengan menerapkan/menggunakan metode pengkajian, studi banding, kerjasama dan kalibrasi.
- d) TNI AU dan PT. Dirgantara Indonesia merumuskan piranti lunak yang mengatur kerjasama terpadu dalam rangka mendukung dan meningkatkan kesiapan Alutsista TNI AU.

KESIMPULAN

Dengan menganalisis kondisi saat ini, pengaruh lingkungan strategis dan kondisi yang diharapkan serta optimalisasi pemberdayaan kemampuan PT. Dirgantara Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

- 1) Tinjauan tentang pemberdayaan kemampuan PT.
- 2) Dirgantara Indonesia yang dibahas dalam tiga sisi persoalan yaitu belum optimalnya sinergitas PT. Dirgantara Indonesia dengan

TNI AU (Dinas Penelitian dan Pengembangan) dalam kemampuan dan sarana riset teknologi, masih adanya keraguan terhadap kemampuan PT. Dirgantara Indonesia dan belum optimal nota kesepahaman sebagai landasan dalam perjanjian kerjasama antara TNI AU dan PT. Dirgantara Indonesia. Korelasi dari tiga persoalan tersebut efektifitas sinergitas dan hilangnya keraguan ditentukan oleh tersedianya sumber daya yang mumpuni dan didukung piranti lunak dalam bentuk nota kesepahaman sebagai payung hukum yang lebih jelas dan tegas.

- 3) PT. Dirgantara Indonesia sebagai komponen pendukung belum diberdayakan secara maksimal oleh pemerintah untuk mendukung TNI AU yang merupakan komponen utama khususnya dalam mendukung peningkatan kesiapan Alutsista TNI AU. PT. Dirgantara Indonesia sesuai perannya dalam pertahanan negara membantu meningkatkan kesiapan Alutsista TNI AU agar kesiapan operasional TNI AU dapat terlaksana dengan optimal.
- 4) Dalam mensikapi kompleksitas perubahan lingkungan yang terjadi, TNI AU harus mampu mengembangkan sikap antisipasi dan proaktif dengan menyatukan segala upaya untuk peningkatan kesiapan Alutsista TNI AU melalui pemberdayaan kemampuan PT. Dirgantara Indonesia dengan melakukan riset teknologi, penataan piranti lunak nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama diantara keduanya dan menghilangkan keraguan terhadap PT. Dirgantara Indonesia.

REFERENSI

- Dess, Gregory G. and Alex Miller (2003), "Strategic Management". International Edition, New York: Mc Grow Hill.
- Donni Juni Priansa. (2015). Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Kamus Besar, (2020) Bahasa Indonesia versi online (<https://kbbi.web.id/mampu>)
- Mangkunegara (2015) Manajemen SDM. Bandung: Alfabeta
- Naskah UURI No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- Naskah UURI No 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara Terminologi TNI Angkatan Udara. Tahun 2002.
- Naskah UURI No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Naskah UURI No 34 Tahun 2004 tentang TNI
Peraturan Pemerintah RI No 29 Tahun 2018
tentang Pemberdayaan Industri
Purnomo Yusgiantoro, (2014). Ekonomi
Pertahanan Teori dan Praktik, PT. Gramedia
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan
Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Ji
